



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

Ambon Ekspres, 13 Oktober 2016

Kadishub Maluku akan Diperiksa Jaksa

AMBON,AE.— Kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan pembangunan bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah, bakal naik status dalam waktu yang tidak lama. Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, tinggal memeriksa beberapa pihak terkait untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikontongi.

Informasi sumber koran ini dilingkup Kejati Maluku menyebutkan, penyelidik telah mengantongi bukti-bukti adanya perbuatan melawan hukum dari kegiatan tersebut. Akibat perbuatan yang melawan hukum itu, ada indikasi kerugian negara yang cukup besar.

“Kasusnya sudah terang. Tinggal pemeriksaan orang perusahaan (pelaksana proyek), terus Kadis Perhubungan Provinsi dan Mantan Gubernur, kemudian tidak lama lagi mungkin naik penyidikan, “beber sumber yang enggan namanya disebutkan ini.

Dikatakan, dalam proyek studi kelayakan pembangunan Bandara Arara tahun anggaran 2015 itu, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gasperz bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipercayakan kepada Jhon Rante, yang juga pejabat dilingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

“KPA-nya Kadis, kemudian Jhon Rante itu PPTK. PPTK sudah pernah diperiksa, sementara Kadis belum, “terangnya.

Dikatakan, sebelumnya tim telah melayangkan surat panggilan kepada Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gasperz. Hanya saja, yang bersangkutan belum dapat hadir karena sementara mengikuti kegiatan bersama gubernur.

Panggilan terhadap Gasperz akan dilayangkan se usai kegiatan. Dugaan kuat, kedua orang itu turut bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Jika, lanjut sumber, pada akhirnya kasus tersebut dinaikan ke tahap Penyidikan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Ambon Ekspres

“Karena jabatan KPA itu ada di Kadis. PPTK kan orang yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan itu, “tambahnya.

Namun kenyataannya, di Arara tidak layak dibangun Bandara. Karena panjang lokasi tidak sesuai dengan surat keputusan yang diturunkan oleh Dirjen Perhubungan udara.

“Panjang lokasinya tidak sesuai dengan keputusan Dirjen, “tandas sumber. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Ajit Latuconsina membenarkan adanya panggilan kepada Kadis. Hanya saja, Kadis meminta agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ditunda hingga selesai kegiatan bersama Gubernur Maluku. “Kita memang sudah pernah panggil. Tetapi yang bersangkutan meminta untuk ditunda karena sementara ikut kegiatan bersama Gubernur di MBD. Jadi nanti kita panggil lagi, “jelasnya.

Menyinggung apakah sudah ada calon tersangka dalam kasus tersebut, Ajit enggan berkomentar sejauh ini. Yang pasti pada prinsipnya, proses penyelidikan masih berjalan.

“Kalau itu saya tidak bisa komentar. Tetapi intinya kasus ini masih berjalan, “tambahnya. Sekedar tahu, anggaran study kelayakan pembangunan Bandara Arara, bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.800 juta. Hanya saja, diduga pihak Dishub sengaja memaksakan proyek study kelayakan dilakukan, padahal sudah mengetahui jika lokasi tersebut tidak layak dibangun bandara. (AFI)